

**RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2020**


NO	ISU PERMASALAHAN STRATEGIS	RENCANA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	
			KELUARAN (OUTPUT)	HASIL (OUTCOME)
1	2	3	4	5
I. MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Pentingnya melaksanakan reviu atas pedoman / acuan pelaksanaan pembangunan Reformasi Birokrasi di Badan Pendapatan Daerah th 2019, supaya pada th 2020 pelaksanaan RB lebih berkualitas, berkelanjutan, terarah dan terfokus pada penerapan pembangunan komponen pengungkit dan komponen hasil.	Membentuk Tim Asesor Reformasi Birokrasi di lingkungan Bapenda Tahun 2020	SK Tim Asesor Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pendapatan Kabupaten Malang Tahun 2020	Terbentuknya Tim Asesor Reformasi Birokrasi di lingkungan Bapenda yang berperan sebagai Tim PMPRB internal, yang akan mengawal pelaksanaan RB di internal Bapenda secara berkelanjutan
		Menyusun Renja Reformasi Birokrasi Bapenda 2020	Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020	Adanya pedoman dalam pelaksanaan RB berfokus pada kegiatan, output dan outcome yang diharapkan
		Melaksanakan sosialisasi Renja Reformasi Birokrasi Bapenda Tahun 2020	Sosialisasi Renja Reformasi Birokrasi Bapenda 2020 untuk seluruh ASN di Bapenda, dengan prioritas para pejabat struktural	Adanya pemahaman dan komitmen dari semua ASN untuk melaksanakan RB di internal Bapenda
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja Reformasi Birokrasi Bapenda Tahun 2019	Laporan Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB tahun 2019	Terlaksananya kontrol atas pelaksanaan RB, fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik
		Membentuk Agen Perubahan Tahun 2020	SK Tim Agen Perubahan pada Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020	Ada perubahan pola pikir dan budaya kerja yang positif, meningkatkan citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat, serta melakukan perubahan ke arah perbaikan yang dapat diukur dan ditingkatkan
II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	Pentingnya harmonisasi atau penataan dan reviu peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah setiap tahun	Melakukan identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan dilakukan analisis dan revisi atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efisien dan efektif	Matriks hasil evaluasi perundang-undangan terkait pajak daerah	Meningkatnya kualitas regulasi, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik khususnya dalam pelayanan pajak daerah di Kabupaten Malang
III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI				
1	Masih adanya ketidaksesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang dihasilkan	Melakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang dihasilkan	Matriks revisi tupoksi dan kinerja Bapenda (Perbup No 39 Tahun 2016)	Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergitas antar bidang serta menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi

1	2	3	4	5
IV.	PENATAAN TATALAKSANA			
1.	Peta proses bisnis yang ada perlu dipetakan ke dalam SOP untuk mempermudah alur pelayanan di Bapenda, serta penerapan e-government untuk peningkatan kualitas pelayanan	Melakukan evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional standar (SOP) yang telah disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi dan hasilnya ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan peta proses bisnis dan SOP;	Peta Proses Bisnis Bapenda dan Penjabaran peta proses bisnis dalam SOP	Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government serta meningkatkan penerapan keterbukaan informasi publik.
Memanfaatkan e-goverment secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Website, Sosial Media, Lapor SP4N dan Surat warga)		Penerapan e-goverment untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Website, Sosial Media, Lapor SP4N dan Surat warga)		
Menerapkan keterbukaan informasi publik		Mengupdate berita, informasi di Website ataupun sosial media yang ada, Penyediaan leaflet, banner di lokasi pelayanan publik		
V	PENATAAN SISTEM SDM APARATUR			
1.	Pentingnya penataan manajemen SDM aparatur dalam rangka mewujudkan SDM aparatur yang kompetitif dan profesionalisme.	Menyusun perencanaan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.	Tabel penyusunan kebutuhan ASN	Tersedianya pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi		Terlaksananya proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik	Terlaksananya pengembangan pegawai berbasis kompetensi dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur	
Penerapan Indikator Kinerja Individu		Tersedianya indikator kinerja individu yang terukur.	Terwujudnya sistem pengukuran kinerja individu yang obyektif, transparan dan akuntabel	
VI	PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Perlunya upaya secara berkelanjutan peningkatan akuntabilitas kinerja oleh semua stakeholder di internal	Keterlibatan pimpinan dalam penerapan AKIP	Pemahaman pimpinan atas kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah	Meningkatkan Capaian Kinerja jangka menengah
			Dokumen perjanjian kinerja yang telah disepakati	Peningkatan Komitmen Pimpinan dengan seluruh pegawai
		Pemantauan kinerja secara berkala	Pengukuran kinerja dengan berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi e-Monev	Meningkatkan Capaian Kinerja secara berkala
		Pemutakhiran data kinerja (update realisasi PAD) sebagai dasar pengukuran kinerja Bapenda	Melaksanakan Pemutakhiran data kinerja	Menyusun Laporan Realisasi PAD yang akuntabilitas

1	2	3	4	5
VII	PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Pentingnya pengawasan secara berkelanjutan dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Pencegahan gratifikasi melalui pelaporan LHKPN dan LHKSN	Daftar PNS yang wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Tahun 2020	Meningkatnya integritas aparatur, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan birokrasi, serta memperbaiki penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi yang mengarah pada perilaku koruptif dan negatif.
		Penerapan SPIP, melalui identifikasi dan penilaian resiko	Penyusunan dan Sosialisasi Dokumen Penilaian Resiko Tahun 2020	Meminimalisir resiko setiap pencapaian tujuan kegiatan sebagai bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
		Penanganan Pengaduan Masyarakat	Mengelola setiap pengaduan masyarakat	Memproses keluhan maupun saran perbaikan terhadap pelayanan yang diberikan
		Sosialisasi tentang Whistle Blowing System (WBS) dan Penanganan Benturan Kepentingan	Sosialisasi tentang Pengendalian Gratifikasi, Penanganan Pengaduan dan Penanganan Benturan Kepentingan dalam setiap jabatan, pekerjaan, dan fungsi di antara pegawai	Terbentuknya <i>clean and good governance</i>
VIII	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Pentingnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi	Reviu atas penyusunan Standar Pelayanan dan diformalkan	Dokumen Standar Pelayanan SOP Pengaduan Langsung dan SOP Pengaduan Tidak Langsung	Meningkatnya kualitas Pelayanan sesuai dengan standart yang diterapkan
		Penerapan Budaya Pelayanan Prima	Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima yang meliputi kode etik dan estetika pelayanan prima	Meningkatnya Pelayanan Prima
			Informasi pelayanan udah diakses masyarakat bisa diakses melalui (website, sosial media, leaflet, dan banner)	Informasi sampai ke masyarakat secara cepat dan akurat
		Penilaian SKM	Melaksanakan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) melalui kuisioner dan Kotak Kepuasan WP	Meningkatkan kepuasan masyarakat atau wajib pajak
		Penerapan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Public Pajak Daerah	Pengembangan aplikasi pajak daerah	Meningkatnya pelayanan kepada wajib pajak

Kepanjen, Januari 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MALANG



Dr. BURNADI, SH., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19600508 198603 1 021